

BAB 2

TINJAUAN UMUM FASILITAS PELATIHAN KEBENCANAAN DAN FASILITAS PENDIDIKAN DARURAT

2.1. FASILITAS PELATIHAN KEBENCANAAN

2.1.1 Fasilitas

2.1.1.1. Pengertian Fasilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) fasilitas berarti sarana yang berguna untuk memperlancar suatu fungsi tertentu. Sarana ini memberikan kemudahan bagi penggunaannya. Fasilitas terbagi menjadi dua jenis, yaitu fasilitas sosial dan fasilitas umum. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang ditujukan untuk masyarakat secara umum, dimana penyediannya dapat berasal dari pemerintah maupun swasta. Sedangkan fasilitas umum adalah fasilitas yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan umum. Menurut The Liang Gie (2006:22) fasilitas adalah segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan manusia. Dari pemaparan di atas maka diketahui jika fasilitas adalah segala kebutuhan yang memberikan kemudahan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan bagi manusia.

2.1.2 Pendidikan dan Pelatihan

2.1.2.1. Pengertian Pendidikan dan Pelatihan

Pelatihan adalah salah satu jenis proses pembelajaran yang dilakukan dalam waktu yang relatif singkat untuk meningkatkan keterampilan di luar sistem pengembangan manusia dengan metode yang lebih mengutamakan taktik dibandingkan dengan teori (Sastrodipoera, 2006). Kegiatan ini berkaitan erat dengan kegiatan pendidikan. Dimana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha yang ditujukan untuk mengembangkan potensi peserta didik, dimana peserta didik diharapkan memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara. Usaha ini dilakukan dengan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar yang mendukung perkembangan peserta didik. Menurut Syah dalam Chandra (2009:33) dikatakan bahwa pendidikan memiliki arti memelihara dan memberi latihan. Kedua istilah tersebut menjelaskan bahwa pendidikan adalah proses memelihara dan pelatihan seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan sikap dan perilakunya. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal. Ketiga jalur pendidikan ini dapat saling melengkapi satu sama lain. Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan memiliki 6 prinsip dalam penyelenggaraannya. Prinsip tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Pendidikan dilaksanakan dengan menerapkan asas demokratis dan berkeadilan, diman tidak ada unsur diskriminasi.
- b. Pengadaan pendidikan merupakan kesatuan yang tersistem dengan keterbukaan dan multi makna.
- c. Pendidikan adalah sebuah kegiatan guna memberdayakan dan membuat peserta didik menjadi berbudaya.
- d. Dalam proses belajar, pendidikan memberikan teladan, menciptakan motivasi, dan mengembangkan kreativitas peserta didik.
- e. Penyelenggaraan pendidikan dilakukan dengan mengembangkan budaya belajar seperti menulis, berhitung, dan membaca bagi setiap masyarakat.
- f. Pendidikan diselenggarakan dengan melakukan pemberdayaan terkait dengan penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan oleh semua komponen masyarakat.

Pendidikan dan pelatihan adalah aktivitas yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia dari sumber daya manusia yang ada (Notoadmojo, 2009). Dalam bahasa suatu institusi atau organisasi istilah pendidikan dan pelatihan ini kemudian

disatukan menjadi diklat. Diklat ini digunakan oleh institusi atau organisasi untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diharapkan dapat menopang tumbuhnya institusi atau organisasi tersebut untuk dapat mencapai tujuan dari institusi atau organisasi tersebut.

2.1.2.2. Fungsi Pendidikan dan Pelatihan

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, fungsi pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan menurut peraturan tersebut adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab.

Menurut Moekijat (1992) tujuan pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut.

- a. Mengembangkan keahlian, dengan keahlian yang berkembang diharapkan peserta pelatihan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efektif dan efisien.
- b. Mengembangkan pengetahuan, kemampuan ini perlu dikembangkan agar peserta pelatihan dapat melakukan pekerjaan secara rasional.
- c. Mengembangkan sikap, aspek ini dikembangkan agar dapat menciptakan kemampuan pekerja yang mampu bekerja sama dengan pekerja lainnya.

2.1.2.3. Jenis Pendidikan dan Penelitian

Menurut Sastrohadiwiry (2005:200-201), pendidikan dan pelatihan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut.

a. Pendidikan Umum

Pendidikan ini merupakan pendidikan yang ditujukan untuk memberikan pengetahuan umum kepada peserta didik. Pendidikan ini bisa diperoleh di dalam maupun di luar sekolah. Penyelenggaranya pun juga beragam, bisa swasta ataupun pemerintah.

b. Pendidikan Kejuruan

Pendidikan yang memberikan pengajaran kepada peserta didik dengan tujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peminatannya.

c. Pelatihan Keahlian

Pendidikan yang ditujukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu, dimana di dalamnya menyangkut pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan tertentu.

d. Pelatihan Kejuruan

Pendidikan ini hampir sama dengan pendidikan keahlian, hanya saja tarafnya lebih rendah.

2.1.2.4. Komponen Pendidikan dan Pelatihan

Menurut Sudjana (1996) komponen-komponen pendidikan adalah sebagai berikut.

a. Masukan sarana

Komponen ini menyangkut segala fasilitas penunjang yang mendukung kegiatan pendidikan dan pelatihan.

b. Masukan mentah

Komponen ini adalah peserta pelatihan dengan segala keadaan yang ada.

c. Masukan lingkungan

Yang dimaksud dari masukan lingkungan adalah faktor lingkungan yang mempengaruhi kegiatan pendidikan dan pelatihan.

d. Proses

Kegiatan interaksi yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan antara peserta dengan *input* yang diberikan.

e. Keluaran

Yaitu hasil yang telah melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.

f. Masukan lain

Berkaitan dengan daya dukung pelaksanaan pelatihan, seperti pemasaran, lapangan kerja, informasi dan situasi sosial budaya yang berkembang.

g. Pengaruh

Berhubungan dengan hasil yang dicapai peserta pelatihan dan pengaruhnya kepada lingkungan.

2.1.2.5. Prinsip Pendidikan dan Pelatihan

Menurut William B. Werther, prinsip-prinsip pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut.

a. Prinsip Partisipasi

Materi pembelajaran akan lebih mudah diterima oleh peserta pendidikan dan pelatihan apabila peserta dapat berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Partisipasi ini akan meningkatkan motivasi peserta dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan. Motivasi ini akan membuat materi yang diberikan lebih cepat masuk dan bertahan lebih lama.

b. Prinsip Repetisi

Repetisi memperkuat suatu pola ke dalam memori seseorang.

c. Prinsip Relevansi

Kegiatan belajar akan lebih mudah dilakukan apabila materi yang disampaikan memiliki relevansi dengan kehidupan sehari-hari.

d. Prinsip Pengalihan Pengetahuan dan Keterampilan

Penerapan teori pada keadaan yang nyata. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan praktik simulasi.

e. Prinsip Umpan Balik

Prinsip ini memungkinkan peserta untuk mengetahui perubahan-perubahan apa saja yang sudah ia alami selama mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik secara kemampuan, keterampilan maupun kepribadian.

2.1.2.6. Metode Pendidikan dan Pelatihan

Menurut Kamil (2010) metode-metode yang dapat diterapkan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut.

a. *Mass teaching method*

Metode pelatihan yang ditujukan pada khalayak luas. Metode ini ditujukan untuk memberikan kesadaran dan ketertarikan.

b. *Group teaching method*

Metode yang ditujukan pada sekelompok kelompok orang. Metode ini merupakan kelanjutan dari metode *mass teaching method* yang ditambah dengan pertimbangan dan mencoba.

c. *Individual teaching method*

Cara ini ditujukan pada individu, dan metode ini dipilih untuk menyampaikan sampai pada tingkatan untuk mengambil alih, aksi, dan kepuasan.

Menurut Sikula (2011) mengemukakan bahwa metode pendidikan dan pelatihan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu *training* dan *classroom methods*. Dalam menjalankan *training methods* terdapat lima cara yaitu sebagai berikut.

a. *On The Job*

Cara ini adalah cara pelatihan dimana peserta terlibat langsung di lapangan untuk belajar dan meniru suatu pekerjaan dengan diawasi seorang pengawas.

b. *Vestibule*

Pelatihan ini dilakukan di dalam kelas dengan tujuan memperkenalkan dan melatih suatu pekerjaan kepada peserta.

c. *Demonstration and example*

Metode pelatihan yang dilakukan dengan cara melakukan peragaan bagaimana melakukan suatu pekerjaan.

d. *Simulation*

Merupakan metode untuk meniru semirip mungkin konsep sebenarnya dari pekerjaan yang akan dijumpai.

e. *Appreniceship*

Metode pelatihan untuk mengembangkan keahlian sehingga peserta dapat mempelajari seluruh unsur dari pekerjaan.

Class methods juga memiliki beberapa cara untuk melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Cara tersebut adalah sebagai berikut.

a. *Lecture*

Metode ini seperti kegiatan belajar mengajar di kelas biasa.

b. *Conference*

Metode pelatihan yang mengajak peserta untuk bersama-sama menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.

c. Program instruksi

Metode ini menggunakan petunjuk yang disampaikan melalui media seperti buku atau internet sehingga peserta dapat belajar sendiri.

d. Studi Kasus

Metode dimana pelatih memberikan kasus tertentu untuk dipecahkan oleh peserta.

e. *Rol Playing*

Metode dimana peserta diajak untuk memainkan peran yang sesuai dengan kondisi pada keadaan nyata.

f. Diskusi

Peserta diajak untuk berani berpendapat dan membuat orang lain yakin dengan pendapatnya.

g. Seminar

Metode yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta untuk menilai pendapat orang lain.

2.1.2.7. Proses Pendidikan dan Pelatihan

Adapun proses pendidikan dan pelatihan merupakan sebuah proses perubahan perilaku, dimana perubahan yang terjadi berupa peningkatan keterampilan dan pengetahuan berdasarkan dari materi pendidikan dan pelatihan yang dilakukan (Notoadmojo, 2009:20). Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan bagaimana proses pendidikan dan pelatihan itu berjalan.

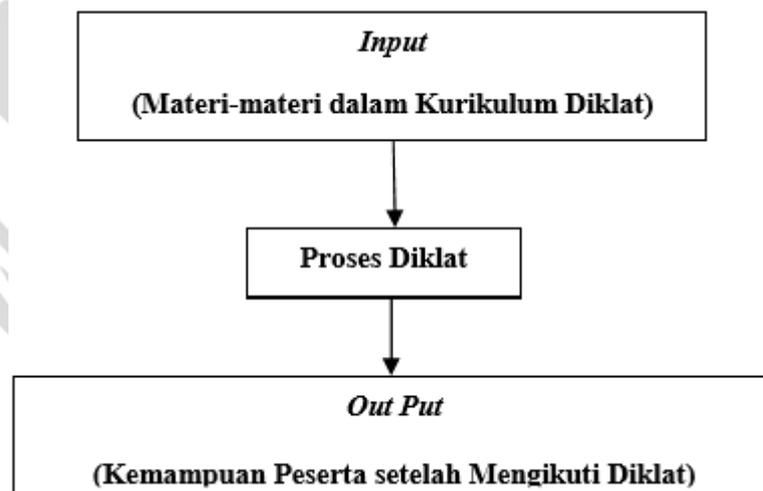


Diagram 2.1 Proses Pendidikan dan Pelatihan
 Sumber: Notoadmojo, 2009:20

Proses yang terjadi pada kegiatan pendidikan dan pelatihan adalah *input*, *proses*, dan *output*. Proses pertama adalah memberikan materi-materi dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan, yang kemudian materi-materi ini akan dialami dalam proses pendidikan dan pelatihan. Proses ini

akan menghasilkan sebuah *output*, yaitu pengetahuan dan keterampilan dari peserta kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut.

2.1.2.8. Indikator Pendidikan dan Pelatihan

Menurut Barry (1999:14), terdapat beberapa indikator dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Berikut ini adalah indikator tersebut:

a. Reaksi

Indikator ini ditujukan untuk melihat bagaimana tingkat kepuasan dari peserta pendidikan dan pelatihan. Terdapat beberapa aspek yang digunakan untuk mengukur indikator ini, yaitu kualitas instruktur, pelayanan panitia, kurikulum pendidikan dan pelatihan, metode yang digunakan, fasilitas, dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan.

b. Pembelajaran

Indikator ini bertujuan untuk melihat sejauh mana materi pendidikan dan pelatihan bisa diterima oleh peserta. Hal ini dapat dilihat dari perubahan sikap, keterampilan dan pengetahuan dari peserta diklat.

c. Perilaku

Indikator ini ditujukan untuk melihat apakah perubahan sikap, penambahan pengetahuan, dan penambahan keterampilan yang diperoleh pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diimplementasikan di dunia nyata.

d. Akhir

Tingkat ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pendidikan dan pelatihan yang sudah berlangsung.

2.1.3 Kebencanaan

2.1.3.1. Pengertian Bencana

Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2006, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Peristiwa ini mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

2.1.3.2. Jenis Bencana

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 bencana terbagi menjadi tiga, yaitu bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial. Bencana alam merupakan bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa alam. Contoh bencana alam adalah gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam, antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia meliputi konflik sosial antar kelompok.

2.1.3.3. Pengertian Penanggulangan Bencana

Pengertian penanggulangan bencana menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2016 adalah serangkaian upaya meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Rangkaian kegiatan tersebut apabila digambarkan dalam siklus penanggulangan bencana adalah sebagai berikut.



Diagram 2.2 Siklus Penanggulangan Bencana
Sumber: Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2008

Pada dasarnya ada tiga tahapan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yakni:

- a. Pra bencana, merupakan situasi dimana keadaan normal (tidak terjadi bencana) dan situasi dimana terdapat kemungkinan potensi bencana.
- b. Saat tanggap darurat adalah situasi saat terjadi bencana.
- c. Pascabencana yang dilakukan sebagai respon setelah terjadi bencana.

2.1.3.4. Tahapan Penanggulangan Bencana

Tahapan penanggulagn bencana dilakukan dengan perencanaan yang terstruktur dengan tahapan yang jelas. Berikut ini adalah tahapan dari proses penanggulangan bencana.

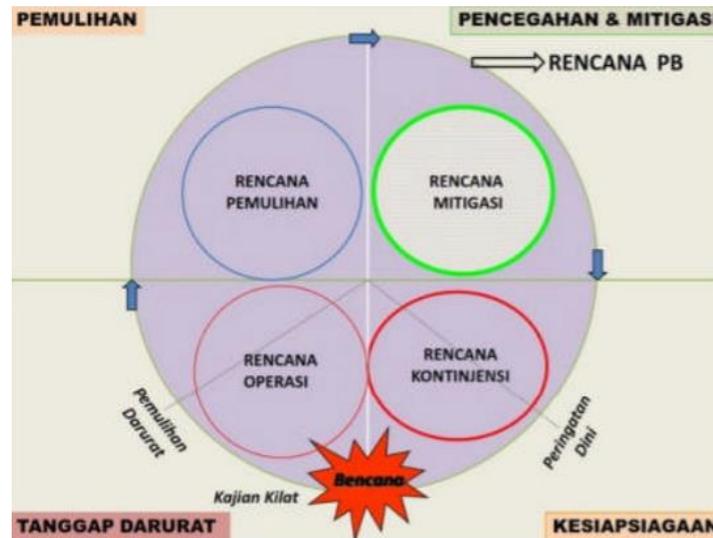


Diagram 2.3 Tahapan Penanggulangan Bencana

Sumber: Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2008

- a. Pada tahap prabencana dilaksanakan kegiatan penyusunan rencana penanggulangan bencana, yang merupakan rencana terstruktur yang meliputi seluruh tahapan kerja dari proses penanganan kebencanaan. Secara khusus untuk upaya pencegahan dan mitigasi bencana tertentu terdapat rencana yang disebut rencana mitigasi.
- b. Pada tahapan prabencana dilakukan penyusunan rencana kesiapsiagaan untuk menghadapi keadaan darurat. Rencana ini didasarkan atas skenario menghadapi bencana tertentu maka disusun satu rencana yang disebut rencana kontijensi.
- c. Pada saat tanggap darurat dilakukan rencana operasi yang merupakan operasionalisasi dari rencana kedaruratan atau rencana kontijensi yang telah disusun.
- d. Pada tahap pemulihan dilakukan penyusunan rencana pemulihan yaitu rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pada pasca bencana. Sedangkan jika bencana belum terjadi, maka dilakukan penyusunan petunjuk mekanisme penanggulangan pasca bencana.

2.1.4 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kebencanaan

2.1.4.1. Pengertian Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kebencanaan

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pusat pendidikan dan pelatihan kebencanaan adalah pokok pangkal segala aktivitas yang berhubungan dengan pengembangan intelektual, kepribadian, dan keterampilan sumber daya manusia yang berkaitan dengan penanganan kebencanaan. Pendidikan dan pelatihan ini bertujuan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari peristiwa bencana yang terjadi. Menurut Ahmad Yani, untuk membangun Pusat Pendidikan dan Pendidikan Kebencanaan terdapat beberapa persyaratan yaitu terkait dengan kurikulum, sarana dan prasarana, peserta dan instruktur. Penyelenggaraan penanggulangan merupakan sesuatu hal yang penting, apalagi bagi daerah yang memiliki potensi terjadi bencana. Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2006 menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang menyangkut penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Secara lebih lanjut kegiatan ini juga menjadi tanggung jawab dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana. Dimana lembaga ini adalah lembaga yang memiliki kewajiban dalam melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang pendidikan dan pelatihan dalam urusannya dengan kebencanaan.

2.1.4.2. Fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kebencanaan

Fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kebencanaan adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk kesadaran masyarakat atas kebencanaan dengan kesadaran atas penyelamatan lingkungan dan akibat-akibatnya.
- b. Membentuk kesadaran akan pengurangan resiko bencana, sehingga terbentuk masyarakat yang sadar bencana.

- c. Mendidik masyarakat pendidikan kebencanaan sehingga membantu penyelamatan dan kesiagaan dalam menghadapi bencana.
- d. Menanamkan kesadaran kepada masyarakat tentang psikologis dampak orang yang tertimpa bencana.
- e. Pengenalan wilayah yang potensi bencana.
- f. Menjadikan masyarakat yang mampu merekatkan solidaritas sosial dan rasa tanggung jawab bersama.

2.1.4.3. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kebencanaan

Menurut Ahmad Yani, ada empat aspek yang mendasari kurikulum kebencanaan. Empat aspek tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan pencegahan merupakan upaya preventif yang ditujukan untuk meminimalisir kerusakan dan korban jika terjadi bencana.
- b. Pendidikan tanggap darurat yaitu merupakan upaya pemberian bantuan darurat dimana di dalamnya terdapat beberapa unsur yaitu pencarian, penyelamatan, dan evakuasi.
- c. Pendidikan rehabilitasi yaitu pemberdayaan dan pengembalian harkat hidup korban bencana. Aspek ini dilakukan dengan perbaikan fisik dan non fisik.
- d. Pendidikan rekonstruksi yaitu pembangunan kembali sarana prasarana dan fasilitas umum yang rusak.

Ahmad Yani juga menjelaskan bahwa untuk mencapai keempat aspek tersebut maka dapat dilakukan pembagian paket pendidikan dan pelatihan menurut waktu dan peserta diklat. Pembagian paket pendidikan dan pelatihannya adalah sebagai berikut.

- a. Paket Wisata
Paket ini merupakan paket dengan jangka waktu yang pendek, dimana pendidikan dan pelatihan hanya dilakukan dalam waktu

1 sampai 2 jam saja. Paket ini digunakan untuk mengenalkan bencana secara umum dan cara cepat dalam penanganan bencana. Target pasar untuk paket ini yaitu pelajar dan masyarakat umum. Kegiatan yang memungkinkan untuk dilakukan pada paket ini adalah menyaksikan pameran, pemutaran film, simulasi di tempat khusus baik di dalam ruangan maupun di halaman yang sudah dirancang khusus.

b. Paket Sosialisasi

Paket ini merupakan pelatihan yang ditujukan untuk pemuda-pemuda di daerah rawan bencana, yang nantinya akan menjadi relawan. Paket ini berfokus pada pendidikan pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Waktu yang digunakan untuk pelatihan antara 7-10 hari. Materi yang disampaikan dalam pelatihan meliputi materi teori (kebencanaan, karakteristik korban, dan SAR) dan teori praktik (P3k, evakuasi, dan rahabilitasi sementara).

c. Paket Dasar

Pelatihan ini ditujukan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat, Anggota SAR, pejabat pemerintah tingkat lokal, dan para teknisi sarana umum seperti pemadam kebakaran, instansi listrik, gas, dan air, para perancang transportasi darat, para psikolog, dll. Waktu yang dibutuhkan untuk pelatihan antara 20-30 hari. Materi disampaikan oleh para ahli yang berkaitan dengan kebencanaan.

d. Paket Manajer

Pelatihan ini merupakan pelatihan yang dikhususkan bagi para pemimpin dan pengambil keputusan. Waktu yang digunakan fleksibel sesuai dengan kesepakatan. Materi yang digunakan adalah mitigasi tingkat manajer.

Menurut Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2016 pasal 2 menyebutkan bahwa diklat PB diperuntukan bagi aparatur, masyarakat, dan lembaga usaha. Pusat pendidikan dan pelatihan kebencanaan memiliki peserta dari kalangan pelajar dari Taman Kanak-Kanak sampai ke Perguruan Tinggi, unsur kepemudaan, masyarakat awam, para relawan, para teknisi sarana umum, kepala daerah dan anggota dewan. Pelatihan yang dilakukan oleh tiap-tiap peserta berbeda-beda tergantung dari paket-paket yang mungkin dilakukan.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan juga memiliki peranan lain, yaitu untuk mengembangkan teknologi dan produk informasi lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat (Ahmad Yani), misalnya:

- a. Peta rawan dan komunitas rentan bencana
- b. Perencanaan kedaruratan
- c. Perencanaan dan temuan teknologi
- d. Mengevaluasi kebijakan terkait kebencanaan

2.1.4.4. Fasilitas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kebencanaan

Menurut Ahmad Yani untuk melaksanakan program pendidikan dan pelatihan bencana diperlukan sarana prasarana sebagai berikut.

- a. Ruang pelatihan yang memuat 40 orang peserta
- b. Ruang simulasi
- c. Halaman untuk simulasi evakuasi dan pertolongan pertama
- d. Ruang pameran dan alat peraga
- e. Ruang pemutaran film
- f. Perpustakaan
- g. Ruang Pusat studi kebencanaan
- h. Laboratorium forensik kebencanaan
- i. Gudang pemeliharaan peralatan praktik
- j. Ruang instruktur dan administrasi
- k. Penginapan peserta
- l. Sarana peribadatan
- m. Dan sarana lain

2.2. SEKOLAH DARURAT

2.2.1 Sekolah

2.2.1.1. Pengertian Sekolah

Sekolah, menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, berarti satuan pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Dalam kegiatannya sekolah memiliki sebuah tujuan, yaitu untuk mengembangkan peserta didik dan mengusahakan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah dengan mengoptimalkan komponen-komponen dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat nyata di sekitarnya.

2.2.1.2. Fungsi Sekolah

Sekolah pada dasarnya memiliki fungsi untuk membina dan mengembangkan kemampuan berpikir dan sikap peserta didik serta menyelenggarakan pendidikan yang memiliki kualitas yang baik dengan melakukan pengelolaan komponen-komponen sekolah, melaksanakan administrasi sekolah dan melaksanakan supervisi. Menurut Simanjuntak (2000:65) sekolah memiliki lima fungsi utama yaitu sebagai berikut.

- a. Mendidik calon warga yang dewasa
- b. Mempersiapkan calon warga masyarakat
- c. Mengembangkan cita-cita profesi atau kerja
- d. Mempersiapkan calon pembentuk keluarga yang baru
- e. Pengembangan pribadi (realisasi pribadi)

Dari penjelasan di atas maka diketahui bahwa fungsi sekolah adalah untuk mendidik dan mengembangkan kemampuan berpikir dan sikap mental peserta didik guna menjadi warga negara yang baik.

2.2.1.3. Standar Sekolah

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 mengatakan bahwa standar sarana dan prasarana

untuk sekolah terbagi menjadi sarana prasarana untuk sekolah dasar/madrasah ibtdaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), dan sekolah menengah atas/madrasah Aliyah (SMA/MA). Berikut ini adalah rangkuman dari standar sarana dan prasarana tersebut.

a. Satuan Pendidikan

1. Memiliki minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar.
2. Sekolah dengan 6 rombongan belajar melayani maksimum 2000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 2000 jiwa dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada, dan bila rombongan belajar lebih dari 24 dilakukan pembangunan sekolah baru.
3. Satu desa/kelurahan dilayani oleh minimum satu sekolah per tingkatannya.
4. Satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu sekolah (per tingkatannya) dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3 km melalui lintasan yang tidak membahayakan.

b. Lahan

1. Lahan untuk satuan pendidikan harus memenuhi ketentuan minimum dan maksimum untuk rasio luas lahan.
2. Luas lahan yang ditentukan merupakan luas lahan yang bisa dipakai secara efektif untuk membangun prasarana sekolah berupa gedung dan tempat bermain/olahraga.
3. Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa. Selain itu memiliki jalur penyelamatan darurat.

4. Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15% tidak berada dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api.
5. Lahan terhindar dari pencemaran air, kebisingan, dan pencemaran udara.
6. Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
7. Lahan memiliki status hak atas tanah dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun.

c. Bangunan Gedung

1. Bangunan gedung untuk satuan pendidikan memiliki rasio minimum dan rasio maksimum tertentu.
2. Bangunan gedung harus memenuhi koefisien dasar bangunan maksimum 30%, koefisien lantai bangunan dan ketinggian maksimum bangunan yang ditetapkan Peraturan Daerah, serta jarak bebas bangunan yang meliputi sempadan bangunan gedung dengan as jalan tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan atau/jaringan tegangan tinggi, jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
3. Bangunan gedung harus memenuhi standar keselamatan, yaitu memiliki struktur yang stabil dan kukuh untuk dapat menahan gempa dan kekuatan alam lainnya dan dilengkapi proteksi pasif dan aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran.
4. Bangunan gedung harus memenuhi standar kesehatan, yaitu mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai, memiliki sanitasi dalam dan

luar, dan menggunakan bahan bangunan yang aman bagi pengguna gedung serta lingkungan.

5. Menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, nyaman, dan aman termasuk bagi penyandang cacat.
6. Memenuhi standar kenyamanan yaitu mampu meredam kebisingan, memiliki temperatur yang sesuai kondisi ruangan, dan dilengkapi dengan lampu penerangan.
7. Bangunan gedung bertingkat memenuhi syarat tertentu, yaitu maksimum terdiri dari tiga lantai dan dilengkapi dengan tangga yang memperhatikan kenyamanan dan keamanan.
8. Bangunan gedung dilengkapi sistem keamanan, yaitu peringatan bahaya, pintu darurat, dan jalur evakuasi, serta akses evakuasi yang sesuai standar.
9. Bangunan gedung dilengkapi instalasi listrik dengan daya minimum 900 watt.
10. Pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi secara profesional.
11. Bangunan harus bertahan minimal 20 tahun.

d. Fasilitas

1. Ruang Kelas
2. Ruang Perpustakaan
3. Ruang Laboratorium
4. Ruang Pimpinan
5. Ruang Tata Usaha
6. Ruang Konseling
7. Ruang Guru
8. Ruang Organisasi Kesiswaan
9. Tempat Beribadah
10. Ruang UKS
11. Jamban

12. Gudang
13. Ruang Sirkulasi
14. Tempat Bermain/Berolahraga

2.2.2 Keadaan Darurat

2.2.2.1. Pengertian Keadaan Darurat

Keadaan darurat berarti suatu keadaan yang tidak terkendali yang dapat menyebabkan munculnya korban jiwa ataupun kerusakan. Dalam menanggapi keadaan darurat ini perlu tindakan yang sigap, dimana tindakan tersebut ditujukan untuk melindungi orang-orang yang berada dalam keadaan tersebut maupun peralatan dan lingkungan dari segala kerusakan.

2.2.2.2. Jenis Keadaan Darurat

Menurut Departemen Tenaga Kerja, keadaan darurat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut.

a. Keadaan darurat tingkat I

Keadaan darurat yang berpotensi mengancam jiwa manusia dan harta benda yang secara normal dapat diatasi oleh personil jaga dari suatu instansi dengan menggunakan prosedur yang telah dipersiapkan tanpa perlu adanya regu bantuan yang dikonsinyalir. Ciri-ciri keadaan darurat ini adalah terjadi pada suatu daerah tunggal, kerusakan dan luka korban terbatas dan penanganan cukup dilakukan oleh personil, peralatan dan bahan yang tersedia pada unit kegiatan.

b. Keadaan darurat tingkat II

Suatu bencana atau kecelakaan berskala besar yang tidak mampu ditangani oleh personil, peralatan dan bahan yang tersedia pada unit kegiatan lain dan institusi berdasarkan tingkat I. Konsekuensi darurat kategori ini adalah suatu kecelakaan bencana besar yang mempunyai konsekuensi seperti terjadinya korban jiwa, rusaknya

harta benda, melumpuhkan kinerja institusi, tidak dapat dikendalikan oleh tim tanggap darurat institusi.

c. Keadaan darurat tingkat III

Bencana dan kecelakaan berskala major atau dasyat yang akibatnya melebihi keadaan darurat tingkat II dan institusi tersebut sudah tidak mampu menanganinya dengan penanganan personil, peralatan, dan material yang tersedia di suatu wilayah berdasarkan tingkat II sehingga perlu koordinasi tingkat nasional.

2.2.2.3. Penyebab Keadaan Darurat

Menurut Erkins (2012) terdapat tiga kategori kejadian yang menimbulkan keadaan darurat:

- a. Operasi dalam keadaan darurat seperti kebakaran, peledakan, tumpahan bahan kimia, kebocoran gas, dan kecelakaan besar.
- b. Gangguan publik seperti ancaman bom, sabotase, jatuhnya pesawat, radiasi.
- c. Bencana alam seperti banjir, tsunami, angin puting beliung, gempa bumi, tersambar petir, dan lain-lain.

2.2.3 Sekolah Darurat

2.2.3.1. Pengertian Sekolah Darurat

Sekolah darurat adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar pada keadaan yang tidak normal atau tidak terkendali. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus, disebutkan bahwa layanan pendidikan dalam situasi darurat diselenggarakan dalam bentuk sekolah darurat. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa sekolah darurat adalah bentuk satuan pendidikan formal yang didirikan pada saat situasi bencana alam dan/atau bencana sosial yang bersifat sementara.

2.2.3.2. Struktur Organisasi Sekolah Darurat

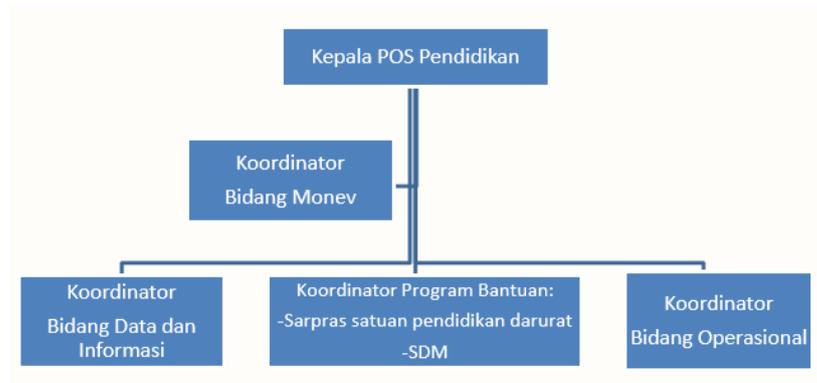


Diagram 2.4 Struktur Organisasi Sekolah Darurat

Sumber: *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dalam Situasi Darurat, 2018*

Bagan di atas merupakan struktur organisasi dalam penyelenggaraan sekolah darurat. Dimana komando utama dari pengadaan sekolah darurat adalah pada Kepala POS Pendidikan. Kepala POS ini kemudian dibantu oleh empat koordinator lainnya, yaitu Koordinator bidang Monev, Koordinator Bidang Data dan Informasi, Koordinator bidang Program Bantuan, dan Koordinator Bidang Operasional.

2.2.3.3. Alur Pengadaan Sekolah Darurat



Diagram 2.5 Alur Pengadaan Sekolah Darurat

Sumber: *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dalam Situasi Darurat, 2018*

Bagan di atas menjelaskan mengenai tahapan yang dilakukan oleh sektor pendidikan terkait dengan pengadaan sekolah darurat. Pada tahapan tersebut ada tahapan yang memerlukan kebutuhan sarana dan prasarana, yaitu pelatihan bagi penduduk, guru, dan relawan serta ruang yang dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran sementara.

2.2.3.4. Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Darurat



Diagram 2.6 Kegiatan Sekolah Darurat

Sumber: Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dalam Situasi Darurat, 2018

Kegiatan pendidikan darurat tidak langsung mengarah pada pendidikan formal bagi para siswa terdampak. Pendidikan darurat juga digunakan untuk melakukan pendekatan terhadap siswa yang terdampak bencana. Pendidikan darurat ini akan melihat keadaan psikis para siswa dan menjadi media rekreasi untuk para siswa ketika menghadapi bencana. Bagan di atas menjelaskan kegiatan-kegiatan yang dilakukan ketika pendidikan darurat berlangsung. Terdapat enam tahapan yang harus dilakukan sebelum akhirnya peserta didik dapat melakukan pembelajaran seperti biasa.

2.2.3.5. Tujuan Sekolah Darurat

Tujuan penyelenggaraan pendidikan darurat adalah sebagai berikut.

- a. Memastikan hak pendidikan bagi peserta didik yang mengalami bencana, baik bencana alam dan/atau bencana sosial.

- b. Menyediakan keperluan terkait lingkungan belajar yang aman, ada jaminan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi, dan pendampingan psikososial anak-anak yang terkena dampak situasi bencana alam dan/atau bencana sosial.
- c. Mengurangi dampak psikologis akibat bencana alam/atau konflik sosial dengan memberikan perasaan normal, kestabilan, dan membangun harapan bagi masa depan anak.
- d. Menyampaikan pesan-pesan penting yang berhubungan dengan risiko-risiko yang timbul dari sebuah kondisi darurat akibat bencana alam dan/atau bencana sosial.

2.2.3.6. Prinsip Sekolah Darurat

Prinsip penyelenggaraan satuan pendidikan darurat meliputi:

1. Prinsip Umum

- a. Tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supermasi hukum.
- b. Non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lain.
- c. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.
- d. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak anak untuk hidup dan tumbuh kembang semaksimal mungkin dalam semua aspek kehidupannya, termasuk aspek fisik, emosional, psikososial, kognitif, sosial dan budaya.
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak memiliki hak untuk berkumpul secara damai, berpartisipasi aktif dalam setiap aspek yang mempengaruhi kehidupan mereka, untuk mengekspresikan

pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya dan pendapat mereka didengar dan ditanggapi dengan sungguh-sungguh.

2. Prinsip Khusus

a. Pemberdayaan masyarakat

Menumbuhkan kesadaran masyarakat satuan pendidikan sejak dini akan pentingnya pemahaman tentang bencana, mulai dari sejarah bencana, bentuk ancaman, kerentanannya, kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pasca bencana.

b. Sinergi Pemangku Kepentingan (*stakeholders*)

Para pemangku kepentingan penyelenggaraan satuan pendidikan aman dari bencana bersinergi dengan menyediakan program yang saling menunjang sehingga penyelenggaraan satuan pendidikan darurat dapat dilakukan secara optimal.

c. Berorientasi nilai

Nilai-nilai luhur kemanusiaan dan karakter bangsa menjadi dasar pendidikan pengurangan resiko bencana.

d. Berorientasi tindakan

Rencana penyelenggaraan satuan pendidikan darurat dari bencana yang aplikatif terintegrasi kedalam manajemen berbasis satuan pendidikan yang peduli anak.

e. Pembelajaran dan perbaikan

2.2.3.7. Standar Sekolah Darurat

Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Darurat yang diselenggarakan pada semua jenjang satuan pendidikan terdampak merupakan pemenuhan pelayanan pendidikan pada masa tanggap darurat dan transisi tanggap darurat ke pemulihan akibat bencana alam dan/atau bencana sosial yang meliputi kebijakan dan koordinasi, penyediaan informasi umum, akses

terhadap fasilitas dan lingkungan belajar, proses pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, fasilitas pendukung pendidikan dan partisipasi masyarakat untuk pendidikan.

a. Penyediaan informasi umum

Merupakan upaya untuk menyajikan data dan informasi layanan pendidikan yang berada di daerah terdampak bencana, berupa jumlah dan kondisi satuan pendidikan, jumlah dan kondisi peserta didik, jumlah dan kondisi pendidik dan tenaga kependidikan, dan sebagainya.

b. Akses terhadap fasilitas dan lingkungan belajar

Ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas pendidikan dan fasilitas pendukungnya dengan merujuk pada kondisi kedaruratan di wilayah bencana, untuk menjembatani kesiapan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan yang terkena bencana sebelum dimulainya pendidikan reguler secara normal.

1. Tersedia kesempatan belajar yang sama tanpa diskriminasi bagi semua anak.
2. Tersedia rute aman dan mudah diakses oleh semua anak ke lingkungan belajar.
3. Tersedia informasi kondisi hambatan fungsi peserta didik untuk menyesuaikan metode pembelajaran sehingga tidak menghambat anak untuk menikmati hak atas pendidikan yang inklusif, aman dan ramah anak.
4. Tersedia kesempatan bagi peserta didik untuk memasuki atau kembali ke satuan pendidikan sesegera mungkin setelah situasi darurat.
5. Tersedia kesempatan bagi peserta didik untuk memasuki atau kembali ke satuan pendidikan sesegera mungkin setelah situasi darurat.

6. Adanya pengakuan dari dinas pendidikan setempat terhadap satuan pendidikan darurat.
7. Tersedianya layanan penanganan psikososial yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, dan kenyamanan belajar di tempat kegiatan satuan pendidikan darurat dilaksanakan.
8. Strategi respon dirancang dan dilaksanakan dengan cara yang tidak merugikan masyarakat atau penyedia dan tidak memperburuk dampak situasi darurat.
9. Dekat dengan sumber air, memiliki fasilitas air bersih dan toilet memadai.

c. Proses pembelajaran

1. Standar proses pembelajaran

Kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar yang relevan dengan budaya, sosial, dan bahasa digunakan untuk menyediakan pendidikan formal-nonformal, sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik

2. Pelatihan, dukungan dan pengembangan profesional

Guru dan tenaga kependidikan lainnya menerima pelatihan, dukungan dan pengembangan profesi yang relevan dan terstruktur secara berkala sesuai dengan kebutuhan situasi.

3. Instruksi dan proses pembelajaran

Instruksi dan proses pembelajaran berpusat pada peserta didik, partisipatif dan inklusif.

d. Pendidik dan tenaga kependidikan

Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung terselenggaranya pendidikan dalam kondisi kedaruratan di wilayah bencana, mencakup keberadaan peserta didik, keberadaan guru dan tenaga kependidikan,

perekrutan dan seleksi pendidik sesuai kebutuhan kompensasi, dukungan dan pengawasan untuk tenaga pendidik dan sebagainya.

e. Fasilitas pendukung pendidikan

Bantuan dasar pendidikan menjamin setiap anak dapat menikmati proses pembelajaran dengan rasa aman, nyaman, dan sehat termasuk bahan ajar yang eksploratif. Seperti tenda atau ruang kelas darurat, penyediaan paket sarana belajar dan mengajar bagi satuan pendidikan-guru-peserta didik, buku-buku pelajaran, peralatan tulis menulis, bangku dan meja belajar, perlengkapan dan peralatan olahraga, lapangan/ ruang dan sarana bermain dan rekreasi anak dan sebagainya.

1. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah untuk KPB di daerah terkena bencana seperti bangunan/ruang kelas darurat untuk proses pembelajaran, papan tulis, meja tulis/kursi, tikar/terpal, baju seragam, sepatu, buku tulis, dan alat tulis, dan lain-lain
2. Struktur dan tempat belajar aman dan dapat diakses oleh semua pelajar, guru, dan tenaga kependidikan lainnya.
3. Lingkungan belajar baik yang permanen maupun sementara diperbaiki, dilengkapi atau diganti sesuai kebutuhan konstruksi dan desain yang tahan bencana.
4. Struktur fisik untuk tempat pembelajaran tepat untuk situasi, termasuk ruang yang cukup untuk fasilitas kelas, administrasi, rekreasi, dan sanitasi.
5. Ruang kelas dan pengaturan tempat duduk memenuhi kesepakatan rasio antara ruang kelas dengan jumlah pelajar dan guru sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimum Pendidikan).

6. Pasokan air bersih yang cukup dan fasilitas sanitasi yang layak tersedia untuk kebersihan pribadi dan perlindungan dengan memperhatikan umur, jenis kelamin, dan orang berkebutuhan khusus sesuai dengan SPM Pendidikan.

f. Partisipasi

Membuka kesempatan partisipasi masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan satuan pendidikan darurat, baik dalam perencanaan kegiatan, pendidikan partisipasi anak dan remaja dalam kegiatan pendidikan hingga partisipasi dalam bentuk bantuan sumber daya untuk mendukung keberlangsungan kegiatan belajar mengajar pada saat darurat bencana.

g. Kebijakan dan koordinasi

Dalam upaya pemenuhan pelayanan pendidikan di masa darurat akibat bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk diantaranya formulasi kebijakan dan peraturan perundangan yang diberlakukan, pendataan kebutuhan satuan pendidikan darurat, mekanisme koordinasi yang transparan pada situasi bencana termasuk berbagai informasi dan peran dan sumberdaya pemangku kepentingan di bidang pendidikan, serta pelebagaan satuan pendidikan darurat yang akan dijalankan.

2.3. TINJAUAN PRESEDEN

2.3.1 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kebencanaan

2.3.1.1. Tokyo Rinkai Disaster Prevention Park



Gambar 2.1 Tokyo Rinkai Disaster Prevention Learning Center
 Sumber: <http://www.tokyorinkai-koen.jp/> diakses pada 20 April 2020

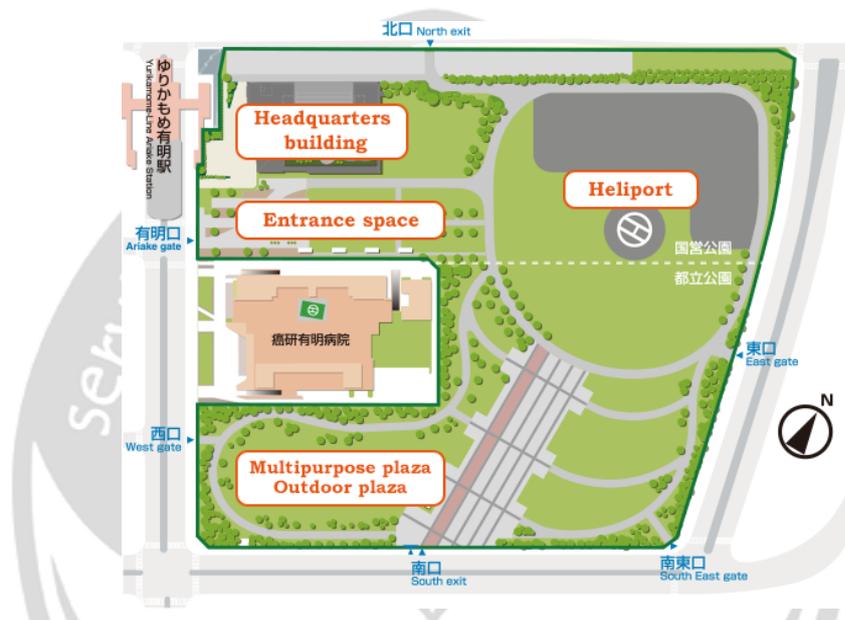
Tokyo Rinkai Disaster Prevention Park terletak di kota Tokyo, Jepang. Bangunan ini berfungsi sebagai pusat operasi pencegahan bencana di wilayah Tokyo dan sekitarnya. Bangunan ini terdiri dari bangunan utama dan taman yang mengelilingi bangunan utama. Taman pada Tokyo Rinkai Disaster Prevention Park ini dapat diakses mulai jam 6.00 pagi hingga jam 20.00 malam. Sedangkan bangunannya dapat diakses mulai pukul 09.30 pagi hingga pukul 17.00 sore. Fasilitas ini ditujukan untuk digunakan oleh masyarakat dan lembaga yang terkait dengan kebencanaan untuk melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Masyarakat dapat mengakses bangunan ini tanpa dipungut biaya.

2.3.1.1.1 Fungsi

Di dalamnya memuat fasilitas tanggap darurat bencana dan juga lembaga yang mengumpulkan informasi bencana, serta mengkoordinasikan tindakan darurat bencana. Taman ini juga merupakan fasilitas pencegahan bencana yang bertindak sebagai *base camp* inti untuk unit bantuan regional dan basis dukungan untuk perawatan medis bencana yang berfungsi secara terintegrasi dengan pusat kontrol distribusi wilayah Higashi Ogishima (Kota Kawasaki). Taman ini memiliki beberapa fungsi utama yaitu adalah sebagai berikut.

- a. Melakukan berbagai simulasi, pelatihan, dan kegiatan lain untuk mempersiapkan diri menghadapi bencana di masa depan.
- b. Taman ini juga mendorong masyarakat untuk menanamkan pengetahuan mereka mengenai penanggulangan bencana.

2.3.1.1.2 Fasilitas



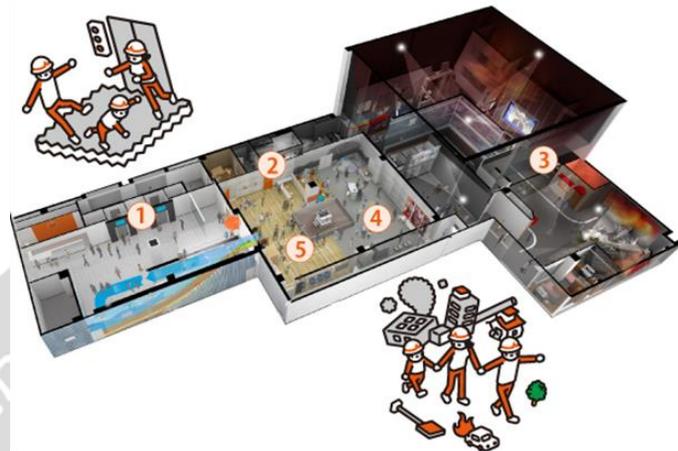
Gambar 2.2 Site Tokyo Rinkai Disaster Prevention Learning Center
 Sumber: <http://www.tokyorinkai-koen.jp/> diakses pada 20 April 2020

Tokyo Rinkai Park ini memiliki beberapa fasilitas yang digunakan untuk melakukan fungsi dari bangunan ini. Fasilitas tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Headquarters Building

Fasilitas ini terbagi menjadi dua bagian yaitu *experience center* dan *learning center*. *Experience center* merupakan area yang difungsikan untuk memberikan pengalaman kepada pengunjung mengenai bagaimana cara menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Pada fasilitas ini pengunjung diajak mengalami dengan cara melakukan simulasi yang menggambarkan keadaan nyata. Sedangkan *learning center* adalah area yang difungsikan untuk

memberikan pembelajaran kepada pengunjung mengenai penanggulangan bencana. Pada area ini terdapat beberapa fasilitas yaitu *information lounge*, *disaster prevention gallery*, *video hall*, *lecture room*, dan *window overlooking the operation room*.



Gambar 2.3 Pembagian Ruang Tokyo Rinkai Disaster Prevention Learning Center

Sumber: <http://www.tokyorinkai-koen.jp/> diakses pada 20 April 2020

b. Entrance Space

Fasilitas ini merupakan area yang menghubungkan antara bangunan utama dengan rumah sakit terdekat sehingga dapat digunakan untuk melakukan evakuasi korban. Pada bagian ini menggunakan perkerasan aspal sehingga dapat dilewati ambulan dan memudahkan untuk dilewati.

c. Heliport

Heliport darurat untuk helikopter transportasi besar untuk digunakan disiapkan di taman. Pada saat bencana helikopter mengangkut orang-orang yang terluka serius ke tempat di mana mereka dapat menerima perawatan medis yang cukup, atau staf dan bahan-bahan ke kantor pusat setempat untuk manajemen bencana.

d. *Multipurpose Plaza*

Area taman kecuali heliport dan situs untuk dukungan perawatan medis bencana berfungsi sebagai basecamp di mana unit respon

darurat untuk menyelamatkan nyawa atau restorasi dan sukarelawan yang masuk bekerja di saat bencana. Langkah-langkah yang tepat untuk mencegah pencairan telah dilakukan, meliputi jalan-jalan taman utama dan heliport.

2.3.1.1.3 Tata Massa dan Tata Lanskap



Gambar 2.4 Massa dan Lanskap Rokyo Rinkai Disaster Prevention Learning Center
Sumber: <http://www.tokyorinkai-koen.jp/>, diakses pada 20 April 2020

Bangunan Tokyo Rinkai Disaster Prevention Park terdiri dari dua kelompok massa. Massa ini dikelompokkan sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk rumah sakit dan sebagai bangunan pelatihan kebencanaan. Pada ruang di antara kedua massa tersebut difungsikan sebagai *enternace* untuk kedua bangunan. Bagian ini juga difungsikan sebagai jalur evakuasi utama ketika terjadi bencana.

Penataan lanskap pada bangunan ini didominasi oleh area terbuka daripada bangunan fisik. Area terbuka ini difungsikan sebagai area evakuasi dan pelatihan serta sebagai ruang terbuka bagi masyarakat umum. Kegiatan pelatihan dan kegiatan evakuasi yang membutuhkan banyak ruang terbuka menjadikan kawasan ini didominasi oleh ruang terbuka. Massa-massa bangunan terletak di bagian tepi dari tapak. Tujuannya adalah agar memudahkan akses untuk menuju ke bangunan-bangunan utama. Selain itu juga agar sirkulasi yang terjadi lebih efektif dan tidak saling mengganggu.

2.3.1.1.4 Hubungan Antar Ruang

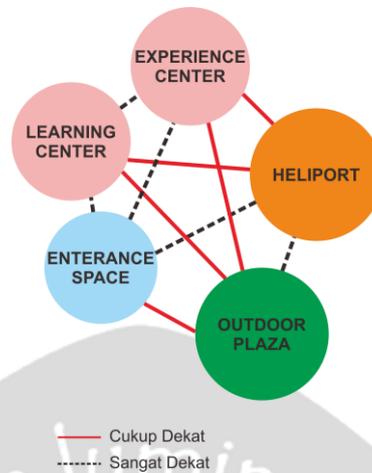


Diagram 2.7 Hubungan Antar Ruang Tokyo Rinkai Disaster Prevention Learning Center

Sumber: Analisis Penulis, 2020

Berdasarkan hubungan antara ruang-ruang yang terdapat di Tokyo Rinkai Disaster Prevention Park ini dibagi menjadi area pelatihan *indoor* dan *outdoor*. Dimana kedua area tersebut dipisahkan oleh area *enterance*. Kedua area ini dipisahkan karena kegiatan di kedua area tersebut memiliki tujuan dan sasaran yang berbeda. Area pelatihan *outdoor* didekatkan dengan area *outdoor plaza*, hal ini dikarenakan keduanya masih berhubungan, dimana area *outdoor plaza* pada waktu-waktu tertentu juga difungsikan sebagai area evakuasi ataupun pelatihan.

2.3.1.2. Yokohama Disaster Risk Reduction Learning Center



Gambar 2.5 Yokohama Disaster Risk Reduction Learning Center

Sumber: <http://bo-sai.city.yokohama.lg.jp/> diakses pada 20 April 2020

Pusat Pencegahan Bencana Warga Yokohama didirikan pada tahun 1983 dengan tujuan utama menanggapi bencana perkotaan di sekitar Stasiun Yokohama, menyebarkan kesadaran akan pengetahuan pencegahan bencana kepada warga, dan menyimpan stok dan peralatan.

2.3.1.2.1 Fungsi

Yokohama Disaster Prevention Learning Center merupakan bangunan yang memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut.

- a. Sebagai tempat pencegahan dan mitigasi bencana.
- b. Sebagai tempat evakuasi sementara ketika terjadi bencana gempa bumi.
- c. Tempat pelatihan Tim Penyelamatan Khusus Bencana.

2.3.1.2.2 Fasilitas

Bangunan ini memiliki dua fasilitas utama yaitu *training room* dan *experience room*. *Training room* digunakan untuk memberi pelatihan kepada pengunjung mengenai bagaimana bertindak ketika terjadi bencana. Ruang ini terbagi menjadi dua jenis yaitu pelatihan dengan praktik dan pembelajaran di kelas. Sedangkan *exhibition room* merupakan ruangan yang difungsikan untuk mengalami kejadian bencana melalui simulasi.

2.3.1.2.3 Tata Massa dan Lanskap



Gambar 2.6 Massa dan Lanskap Yokohama Disaster Risk Reduction Learning Center
Sumber: www.google.co.id/maps, diakses pada 20 April 2020

Yokohama Disaster Prevention Learning Center terdiri dari satu massa dan sebuah ruang terbuka yang cukup luas. Massa bangunan diletakan di ujung tapak, yang merupakan area yang cukup dekat dengan jalan utama. Massa bangunan ini menggunakan bentuk dasar balok yang sudah mengalami transformasi. Bentuk massa ini dipilih karena bentuk tersebut cenderung efisien dalam penggunaan ruangnya. Pada area *enterance* terdapat plaa yang cukup luas yang berhubungan langsung dengan taman kota. Hubungan yang terjadi memungkinkan kegiatan yang terjadi di area tersebut dapat saling berkesinambungan satu sama lain. Selain itu, area yang luas juga dapat digunakan sebagai tempat alternative pelatihan kebencanaan.

2.3.2 Sekolah Darurat

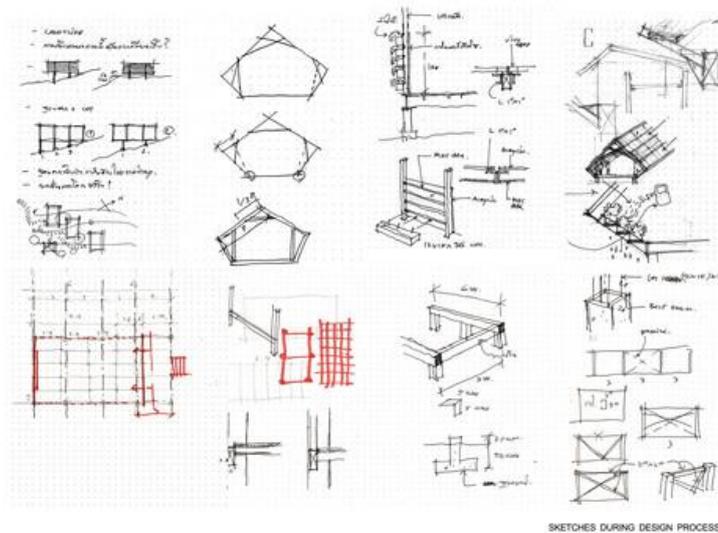
2.3.2.1. Bann Huay San Yaw



Gambar 2.7 Bann Huay San Yaw

Sumber: www.archdaily.com diakses pada 20 April 2020

Bangunan Bann Huay San Yaw ini dibangun pada tahun 2015 oleh Vin Varavarn Architects sebagai respon dari bencana gempa bumi yang melanda Provinsi Chiang Rai di Thailand pada tahun sebelumnya. Pembangunan ini merupakan hasil dari program Design for Disaster yang diadakan oleh pemerintah Thailand sebagai program pemulihan pascabencana.



Gambar 2.8 Konsep Bann Huay San Yaw
 Sumber: www.archdaily.com diakses pada 20 April 2020

Konsep desain yang diterapkan oleh arsitek adalah bagaimana bisa memberikan suasana yang memeriahkan lewat bangunan sekolah yang dibuat. Hal ini melihat dari keadaan pelaku yang merupakan orban dari sebuah bencana gempa bumi. Pada satu bangunan terdapat tiga kelas dengan serambi yang ditujukan untuk tempat meletakkan sepatu serta untuk mengurangi kebisingan antar kelas. Salah satu fitur pada bangunan ini adalah rak yang berada di pinggir-pinggir bangunan. Rak ini difungsikan sebagai pengaman dan juga sebagai tempat rak bunga. Dimana rak ini akan menciptakan sebuah suasana yang lebih ramah bagi pengguna, terutama bagi anak-anak yang sedang mengalami musibah. Diharapkan suasana yang dibangun dapat memberikan kegembiraan bagi peserta didik.

Bangunan ini dalam perancangannya memiliki persyaratan yaitu harus mudah dibangun oleh pekerja lokal dan membutuhkan anggaran yang tidak terlalu banyak. Selain itu bangunan juga harus tahan gempa. Maka digunakanlah material yang ringan untuk mengurangi momentum horizontal yang mungkin terjadi.

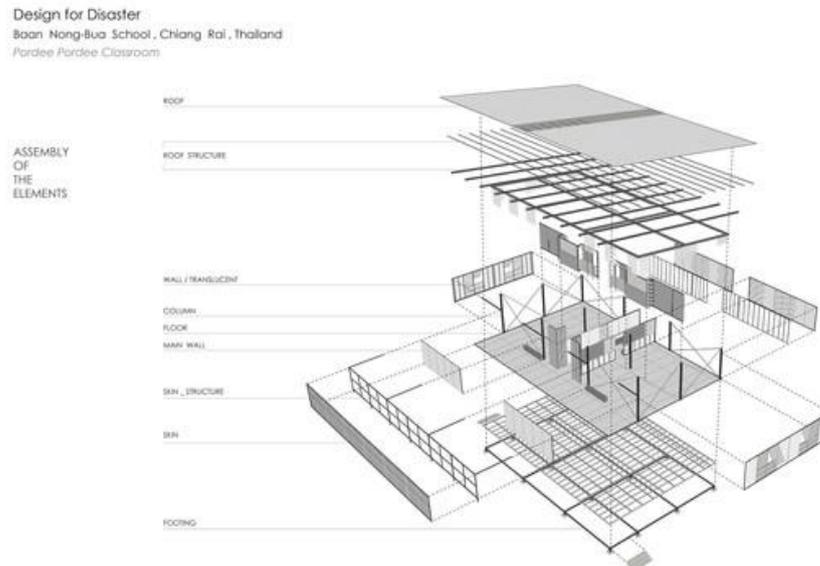
2.3.2.2. Bann Nong Bua School



Gambar 2.9 Bann Nong Bua School

Sumber: www.archdaily.com diakses pada 20 April 2020

Bangunan yang memiliki luas area 215 m² ini dibangun pada tahun 2015 oleh Junsekino Architect and Design. Bangunan ini dibangun untuk merespon gempa yang terjadi di Thailand pada tahun 2014. Bangunan ini merupakan hasil dari program Design for Disaster yang diterapkan oleh pemerintah Thailand untuk menanggapi keadaan yang ada.



Gambar 2.10 Aksonometri Bann Nong Bua School
Sumber: www.archdaily.com diakses pada 20 April 2020

Sekolah ini memiliki 4 ruang kelas dengan ukuran 48 m². Selain itu juga terdapat ruang pusat yang dapat digunakan untuk beraktivitas oleh peserta didik. Struktur bangunan menggunakan kerangka baja karena dirasa struktur ini lebih fleksibel dan dapat menyerap gempa yang sering terjadi. Selain itu struktur ini juga cepat untuk dibangun.

Dinding bangunan terdiri dari sistem modular papan semen kayu. Dinding jenis ini dipilih karena cenderung lebih praktis. Papan semen kayu ini digunakan untuk membuat rak juga, sehingga lebih praktis dan mengurangi sisa konstruksi yang memungkinkan terjadi.

Konsep yang digunakan dalam desain ini adalah ditujukan untuk pengguna bangunan yaitu guru dan murid. Desain bangunan ini sangat fleksibel sehingga dapat menyesuaikan kebutuhan guru dan murid. Misalnya ruang kelas dapat disatukan dengan pengurangan partisi. Bangunan ini juga memperhatikan kondisi cuaca di daerah setempat yang memungkinkan sirkulasi udara alami, dan penetrasi cahaya alami ke dalam bangunan. Selain itu bangunan dituntut memiliki penampilan seperti

pavilion sesuai dengan arsitektur pedesaan dimana langit-langit ditinggikan untuk memungkinkan cahaya matahari masuk ke dalam ruang kelas.

2.4. TINJAUAN UMUM FASILITAS PELATIHAN KEBENCANAAN DAN FASILITAS PENDIDIKAN DARURAT

2.4.1 Pengertian

Fasilitas Pendidikan Kebencanaan dan Fasilitas Pendidikan Darurat ini merupakan sebuah area yang dimanfaatkan sebagai tempat penanggulangan bencana yang ada di Kabupaten Sleman, khususnya yang terkait dengan aktivitas Gunung Merapi. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kebencanaan ini merupakan tempat yang dikhususkan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi warga baik yang dilakukan pra bencana ataupun pasca bencana.

2.4.2 Fungsi

Secara umum fungsi yang diwadahi di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kebencanaan ini adalah fungsi pendidikan yang terbagi menjadi dua jenis pelaksanaan, yaitu sebagai berikut.

a. Pra Bencana

Fasilitas yang digunakan untuk memberikan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan terkait penanggulangan bencana. Pada tahap pra bencana fasilitas ini digunakan oleh lembaga-lembaga terkait kebencanaan untuk melakukan pendidikan dan pelatihan kepada pihak-pihak terkait, guna meningkatkan kualitas dari penanganan bencana. Selain itu, fasilitas ini juga digunakan untuk mengajak masyarakat umum untuk dapat lebih memberikan perhatian khusus terkait bencana yang ada.

b. Pasca Bencana

Pada tahap pasca bencana, fasilitas ini digunakan untuk pengadaan fasilitas pendidikan darurat bagi anak-anak yang tertimpa bencana dan tidak mungkin melakukan pendidikan di sekolahnya. Adanya

fasilitas ini diharapkan dapat membuat pendidikan anak-anak yang tertimpa bencana dapat tetap berlanjut.

2.4.3 Sistem Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kebencanaan ini secara umum terbagi menjadi dua, yaitu kegiatan yang dilakukan pra bencana dan kegiatan yang dilakukan pasca bencana. Berikut ini adalah rincian kegiatan yang akan dilakukan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kebencanaan ini.

a. Pra Bencana

Kegiatan utama yang dilakukan pada tahap pra bencana adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan kebencanaan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dikoordinasikan oleh lembaga kebencanaan di tingkat daerah yang bekerja sama dengan sektor pendidikan di daerah setempat. Fasilitas ini berusaha menjangkau sebanyak mungkin masyarakat untuk dapat memahami hal-hal yang terkait dengan kebencanaan. Dalam pelaksanaannya kegiatan pada tahap pra bencana ini terbagi menjadi beberapa paket, yaitu sebagai berikut.

i. Paket Wisata

Paket ini merupakan paket yang ditujukan untuk masyarakat secara umum. Dimana masyarakat bisa mengenal bencana melalui kegiatan yang disajikan, seperti melalui pameran, galeri, pemutaran film, dan simulasi. Alokasi waktu yang dibutuhkan adalah 1-2 jam.

ii. Paket Sosialisasi

Paket ini merupakan pelatihan yang ditujukan untuk pemuda-pemuda di daerah rawan bencana, yang nantinya akan menjadi relawan. Alokasi waktu yang dibutuhkan antara 7-10 hari. Paket ini berfokus pada pendidikan pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

iii. Paket Dasar

Pelatihan ini ditujukan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat, Anggota SAR, pejabat pemerintah tingkat lokal, dan para teknisi sara umum. Waktu yang dibutuhkan berkisar 20-30 hari.

iv. Paket Manajer

Paket ini ditujukan untuk para pengambil keputusan, seperti kepala daerah. Waktu yang digunakan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

b. Pasca Bencana

Pada tahap pasca bencana, kegiatan yang dilakukan utamanya adalah kegiatan pendidikan darurat. Untuk melaksanakan pendidikan darurat ini diperlukan beberapa tahapan yaitu sebagai berikut.

- i. Pemetaan kondisi psikososial
- ii. Pengenalan lingkungan
- iii. Kegiatan rekreasional
- iv. Kegiatan belajar dasar
- v. Kegiatan seni
- vi. Kegiatan religious
- vii. Kegiatan belajar mengajar seperti biasa

Tahapan ini dilakukan agar peserta didik korban bencana dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada, selain itu juga digunakan untuk melihat kondisi kejiwaan dari masing-masing peserta didik.

2.4.4 Fasilitas

Fasilitas utama yang ada di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kebencanaan ini adalah sebagai berikut.

- a. Ruang pelatihan dan pendidikan multifungsi
- b. Ruang simulasi
- c. Halaman untuk simulasi evakuasi dan pertolongan pertama

- d. Ruang pameran dan alat peraga
- e. Ruang pemutaran film
- f. Perpustakaan
- g. Ruang pusat studi kebencanaan
- h. Laboratorium forensik kebencanaan
- i. Gudang pemeliharaan peralatan praktik
- j. Ruang instruktur dan administrasi
- k. Penginapan peserta
- l. Klinik
- m. Plaza multifungsi
- n. Sarana peribadatan

